

487

Perang sebagai Daya Gerak Sejarah Umat Manusia

Wiratmo SOEKITO*

I

Pada 26 Juni 1945, 48 hari setelah kapitulasi Jerman dan 50 hari sebelum penyerahan Jepang dalam Perang Dunia II, lahirlah sebuah Piagam, ditandatangani oleh 51 negara di San Fransisco, yang dimulai dalam mukadimahnya dengan kata-kata: "Kami Rakyat-rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan hati untuk menyelamatkan generasi-generasi mendatang dari bencana perang, yang di masa hidup kami telah dua kali membawa dukacita yang tak terperikan bagi umat manusia."

Akan tetapi, hanya lima tahun setelah Perang Dunia II berakhir, pecahlah Perang Korea (1950-1953), di mana salah satu pihak yang berperang menggunakan bendera PBB. Dalam pada itu Perang Arab-Israel di Timur Tengah telah terjadi sebanyak empat kali (1948, 1956, 1967, dan 1973). Dan di Teluk Persia sejak tahun 1980 berkobar Perang Irak-Iran. Ini hanya untuk mengambil beberapa contoh saja yang menunjukkan bahwa perang itu, betapapun besarnya tekad Rakyat-rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam tahun 1945, ternyata tidak dapat dielakkan.

Yang menjadi pertanyaan, ialah, apakah perang itu baik ataukah buruk. Marilah kita ingat bahwa tanpa Perang Dunia I (1914-1918) tidak bakal ada Revolusi Oktober 1917 di Rusia yang lima tahun kemudian melahirkan Uni Republik Sosialis Soviet. Marilah kita ingat pula bahwa tanpa Perang Dunia II (1939-1945) tidak bakal ada dekolonisasi yang telah mengakhiri penjajahan atas hampir semua bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Perang telah menciptakan perubahan-perubahan yang memungkinkan kemajuan-kema-

*Pengamat masalah-masalah luar negeri.

juan dalam perkembangan kebudayaan. "Polémos pantoon mén patèr ésti, pantoon de basileus," kata Herakleitos, filsuf Yunani pra-Socrates, yang artinya, "Perang adalah bapak dari semuanya, raja dari semuanya." Tidak dapat kita bayangkan bentuk kebudayaan dewasa ini seandainya tidak ada perang, meskipun sangat besar korban yang dimintanya. Dan perang tidak akan timbul lagi apabila dunia sudah berhasil mencapai puncak prestasi politik, bentuk terakhir kehidupan politik. Dalam tahun 1815, setelah Kongres Wina, yang diketuai oleh Pangeran Metternich, berhasil menciptakan suatu persetujuan perdamaian untuk seluruh Eropa pada akhir Perang Napoleon, seorang ahli sejarah Jerman, Leopold von Ranke, berpendapat bahwa orde Eropa ketika itu telah mencerminkan puncak prestasi politik. Akan tetapi, pendapatnya itu keliru sekali, karena, mengabaikan kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi sebagai kekuatan-kekuatan baru, dan hanya mementingkan negara sebagai tema utamanya.

Hasil Kongres Wina, yang dilukiskan sebagai konser negara-negara Eropa dengan pemerintahan konservatif, ternyata masih jauh dari puncak prestasi politik. Sebab, dalam tahun 1848, jadi hanya 33 tahun kemudian, diilhami oleh Manifes Partai Komunis yang disusun oleh Karl Marx dan Friedrich Engels di London, pecahlah revolusi di Prancis yang oleh Metternich dinilai sebagai repetisi tahun 1893, ketika Revolusi Prancis yang dimulai dalam tahun 1789 mengalami perjuangan kekuasaan yang meningkat antara golongan-golongan moderat dan radikal. Revolusi di Prancis dalam tahun 1848 itu menjalar sampai di Australia dan negara-negara Eropa lainnya, tetapi, dalam pertengahan tahun itu berakhir dengan kegagalan. Kendatipun begitu, apa yang telah terjadi di Eropa dalam tahun 1848 itu menguatkan kekeliruan teori Leopold von Ranke yang mengatakan bahwa dalam tahun 1815 orde Eropa telah mencerminkan puncak prestasi politik. Ini berarti bahwa setelah tahun 1815 perang masih akan pecah lagi di Eropa. Dalam tahun 1815 itu lahirlah Pangeran Otto von Bismarck di Schoenhausen, yang kelak akan menjadi seorang negarawan besar untuk menyatukan kembali semua negara Jerman. Kampanye penyatuan kembali yang dilancarkannya itu telah melibatkan perang dengan Denmark ketika ia mencaplok Schleswig-Holstein (1864), dengan Austria (1866), dan dengan Prancis (1870-1871) ketika ia mengambil alih Alsace-Lorraine.

II

Kampanye Bismarck untuk menyatukan negara-negara Jerman dimaksudkan untuk menciptakan stabilisasi Eropa Tengah. Menurut strategi Bismarck, setelah Austria dan Prancis dikalahkan, Jerman akan mengadakan konsolidasi persatuannya dengan keamanan yang akan diperolehnya dari persekutuan

yang akan dibuatnya dengan Inggris dan Rusia. Akan tetapi, strategi Bismarck ini ternyata tidak berhasil mencapai sukses, karena, ketika tiada satu pihak pun (Jerman atau Rusia atau Inggris) yang akan mampu membayangkan keamanan dan perdamaian di Eropa tanpa memiliki pengaruh yang menentukan di Alsace-Lorraine di belahan Barat dan tanpa menciptakan hegemoni di Eropa Timur. Oleh karena pihak-pihak tersebut berusaha mencapai tujuan-tujuan inilah pecah Perang Dunia I, di mana Inggris mengadakan koalisi dengan Rusia untuk mengalahkan Jerman. Walaupun dalam tahun 1918 Jerman dapat dikalahkan, namun, Rusia tak berhasil menciptakan hegemoni di Eropa Timur, sedang Inggris pun tak berhasil pula memenuhi aspirasi-aspirasi Eropanya. Di Rusia malahan pecah revolusi yang berhasil mengakhiri kekuasaan Tsar Nikolas II. Walaupun dikalahkan, namun, setelah berakhirnya Perang Dunia I, di bawah pimpinan negarawan Gustav Stresemann, Jerman masih tetap menginginkan hegemoni di Eropa Timur, sambil mengamankan lambung baratnya dengan menandatangani Pakta Locarno 1925. Untuk memenuhi aspirasi-aspirasinya terhadap Eropa Timur itu, Jerman mempersiapkan langkah-langkah diplomasi terhadap Polandia dan Cekoslowakia. Akan tetapi, dalam tahun 1929 Stresemann meninggal dalam usia 51 tahun, enam tahun setelah menjadi Kanselir Jerman dan tiga tahun setelah menjadi Pemenang Hadiah Nobel untuk Perdamaian. Dalam tahun berikutnya Jerman memilih negarawan Heinrich Brüning sebagai kanselir baru yang secara terbuka telah melawan Hitler, tetapi, dalam tahun berikutnya setelah dalam tahun 1932 membubarkan milisi Hitler, karena tidak berhasil menanggulangi masalah ekonomi, digantikan dengan Hitler yang segera menyiapkan perebutan kekuasaan. Di bawah pimpinan Hitler, Jerman memang menjalankan strategi yang masih serupa dengan strategi yang diwariskan oleh Bismarck dalam akhir abad yang lalu, tetapi, dengan kampanye dan diplomasi militer yang lebih keras.

Ketika Jerman, di bawah pimpinan Hitler, dalam tahun 1938 mengadakan invasi ke Austria dan Cekoslowakia, Inggris dan Prancis masih dapat menerimanya. Baru setelah Jerman menyerang Polandia dalam tahun berikutnya, Inggris-Prancis mengumumkan perang terhadap Jerman. Ini berarti kegagalan memperoleh sebuah formula yang dapat diterima secara universal untuk masa depan Jerman. Kegagalan ini mengalami dramatisasi dengan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II. Kini Rusia, yang mengklaim dirinya sebagai pemenang sebenarnya dalam Perang Dunia II, ingin menegakkan hegemoni di Eropa Timur dengan membagi Jerman menjadi dua. Apabila formula Rusia ini dapat diterima oleh Eropa Barat dengan mengakui Eropa Timur sebagai hegemoni Soviet, Moskwa akan berhasil menciptakan stabilisasi di Eropa Tengah. Akan tetapi, Eropa Barat tidak dapat menerimanya, sehingga, pecahlah Perang Dingin Timur-Barat sejak Cekoslowakia jatuh ke dalam tangan komunis dalam tahun 1948.

Dalam menghadapi situasi Eropa ini, Jerman Barat mempunyai dua pilihan. Pilihan pertama tetap melanjutkan strategi yang diwariskan oleh Bismarck dengan mengadakan persekutuan dengan Rusia dan Inggris, yang berarti memberikan prioritas utama kepada penyatuan kembali kedua Jerman. Pilihan lainnya, memberikan prioritas utama kepada perhatian dan integrasi lembaga-lembaga Barat, yang mendorong Jerman Barat untuk menjadi anggota Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO) dalam tahun 1955. Di bawah pimpinan Konrad Adenauer, yang menjadi kanselir sampai dengan tahun 1963, Jerman Barat mengambil pilihan terakhir. Akan tetapi, ketika menjadi kanselir selama tahun-tahun 1969-1974, Willy Brandt menjalankan Ostpolitik yang hanya berhasil meredakan ketegangan Timur-Barat di Eropa, tetapi, tidak memperbaiki prospek untuk penyatuan kembali kedua Jerman. Oleh sebab hanya penyesuaian diri dengan Eropa Timur saja yang diutamakan, Ostpolitik tidak menyelesaikan masalah Jerman yang disebut Deutschlandpolitik. Dengan melepaskan klaim-klaim teritorialnya atas wilayah sebelah timur garis Oder-Neisse dan dengan menahan diri dari keinginan memperoleh keuntungan besar atas kerugian Eropa Timur, jelaslah bahwa Brandt telah meninggalkan strategi Stresemann yang menghendaki peranan Jerman dalam menciptakan stabilisasi di Eropa Tengah. Ostpolitik Brandt hanya memperoleh imbalan dari Eropa Timur yang berupa peredaan ketegangan, tetapi, Deutschlandpolitik Adenauer tidak hanya dapat memperoleh imbalan dari Eropa Timur yang berupa peredaan ketegangan, melainkan, juga prospek yang lebih baik untuk penyatuan kembali kedua Jerman. Sebab, dengan berpaling kepada Barat, Jerman Barat dapat menuntut kepada Eropa Timur untuk memberi imbalan prospek yang lebih baik untuk penyatuan kembali kedua Jerman bagi peredaan ketegangan yang akan diberikan oleh Barat.

III

Jadi, di masa Adenauer, peredaan ketegangan di Eropa merupakan konsesi Barat, sedang di masa Brandt, sebaliknya, merupakan konsesi Timur. Untuk mengetahui latar belakangnya, perlu diperhatikan perkembangan di Eropa sejak ditandatanganinya Perjanjian Masyarakat Pertahanan Eropa di Bonn pada 26 Mei 1952 oleh Jerman Barat, Prancis, Italia dan Benelux, yang bertujuan membentuk suatu kementerian pertahanan Eropa dalam arti kata sebenarnya dengan suatu angkatan bersenjata yang terintegrasi. Sebagai reaksinya, dalam tahun itu juga Rusia menawarkan persetujuannya untuk didirikannya sebuah Jerman yang dipersatukan kembali, tetapi, yang non-blok dan yang tidak dipersenjatai kembali. Tujuan Rusia dengan tawarannya ini adalah untuk menggagalkan pembentukan Masyarakat Pertahanan Eropa (EDC) yang akan mempersenjatai kembali Jerman. Akan tetapi, tawaran Rusia ini tidak pernah diuji oleh Adenauer, karena, dengan segera Rusia menarik kembali tawarannya itu. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena di

dalam hierarki Soviet timbul keadaan yang tidak menentu setelah Sekjen Partai Komunis dan Perdana Menteri Uni Soviet Josef Stalin menderita sakit dalam tahun 1952, sehingga, laporan politik kepada Kongress XXIX PKUS disampaikan oleh Georgi Malenkov. Akan tetapi, mungkin pula disebabkan oleh karena Rusia melihat kesempatan yang lebih baik untuk menggagalkan EDC, mengingat bahwa di dalam Majelis Nasional Prancis terdapat tiga kelompok penentang pembentukan EDC tersebut.

Pertama-tama adalah kelompok komunis, kiri non-komunis dan sayap kanan tradisional, yang bersama-sama menentang persenjataan kembali Jerman. Kelompok berikutnya adalah kaum Gaullis, baik yang ortodoks maupun yang liberal. Segi yang mereka tentang dari EDC adalah supranasionalismenya dan bukannya persenjataan kembali Jerman. Kelompok terakhir adalah kaum kiri tengah, yaitu kaum sosialis yang mengkhawatirkan munculnya kekuatan militer Jerman, sedang tentara Prancis telah dikirim ke Indocina. Kaum sosialis memajukan dua prasyarat bagi penerimaan EDC. Prasyarat pertama adalah Prancis harus mempunyai hubungan erat dengan Inggris terlebih dulu. Prasyarat lainnya adalah tentara Eropa itu nanti harus ditempatkan di bawah badan politik supranasional dengan kekuasaan terbatas namun nyata.

Oposisi terhadap EDC di dalam Majelis Nasional Prancis mencapai puncaknya setelah Pierre Mendès-France menjadi perdana menteri dalam bulan Juni 1954. Perdana Menteri Antoine Pinay, yang mengambil prakarsa EDC, dijatuhkan di Majelis Nasional dalam bulan Desember 1952. Penggantinya, Rene Meyer, lebih radikal, tetapi, jatuh juga hanya dalam bulan Mei berikutnya. Dalam bulan berikutnya, ia digantikan oleh Joseph Laniel, tetapi, hanya untuk 12 bulan saja sampai tiba gilirannya bagi Mendès-France. Di bawah pemerintahannya Prancis mengadakan perundingan dengan Vietminh di Jenewa mengenai penghentian permusuhan di Indocina. Persetujuan Jenewa ditandatangani pada 31 Juli 1954. Sebenarnya Vietminh tidak dapat menerima persetujuan ini, karena dalam waktu dua tahun lagi seluruh Vietnam akan dapat direbutnya apabila perangnya dengan Prancis, yang telah berkobar sejak tahun 1946, diteruskan. Akan tetapi, Vietminh mendapat tekanan Rusia dan Cina. Menurut penilaian Rusia, apabila Perundingan Jenewa berakhir dengan suatu persetujuan, Mendès-France tidak akan mengundurkan diri. Dengan Mendès-France tetap memimpin pemerintahan, Majelis Nasional Prancis akan menolak ratifikasi EDC. Penilaian Rusia ini tepat. Segera setelah Persetujuan Jenewa ditandatangani, Mendès-France pergi ke Brussel untuk merundingkan amandemen EDC dengan sekutu-sekutunya dalam NATO yang telah mendukung Perjanjian Bonn 26 Mei 1952. Setelah saran-sarannya ditolak, Mendès-France membawa rencana EDC ke Majelis Nasional yang, seperti sudah diharapkan, menolak ratifikasinya. Dalam pada itu, tekanan Cina terhadap Vietminh untuk menyukseskan Perundingan Jenewa tidak ada hu-

bungannya dengan EDC. Menurut penilaian Cina, apabila Perang Vietminh-Prancis dilanjutkan, AS akan datang membantu Prancis, sedang Cina, dengan pengalaman pahit dalam Perang Korea, tidak bersedia terlibat dalam perang baru dengan AS di lambung selatan.

Dengan keputusan Majelis Nasional Prancis yang menolak ratifikasi EDC terkuburlah Perjanjian Bonn 26 Mei 1952 itu. Sebagai reaksi kepada kegagalan EDC, Inggris (yang tidak turut menandatangani Perjanjian Bonn) menyelenggarakan sebuah konferensi di London dalam bulan September 1954 negara-negara anggota Pakta Brussel (Inggris, Prancis, dan Benelux), yang juga dihadiri oleh Jerman Barat, Italia, AS dan Kanada. Hasilnya ialah diperluasnya keanggotaan Pakta Brussel untuk menjadi landasan pembentukan suatu Persatuan Eropa Barat (WEU) yang akan meliputi Jerman Barat dan Italia. Hal ini dilaksanakan dalam Persetujuan-persetujuan Paris 23 Oktober (1954) yang bersamaan waktunya dengan akhir pendudukan tentara sekutu di Jerman Barat, sehingga, yang terakhir ini betul-betul merupakan sebuah anggota berdaulat dari masyarakat internasional, lima tahun setelah lahirnya Republik Federasi Jerman. Dalam tahun berikutnya, yaitu pada 5 Mei 1955 Jerman Barat diterima sebagai negara anggota NATO. Sebagai reaksinya, Rusia membentuk Organisasi Pakta Warsawa hanya 11 hari kemudian (14 Mei). Untuk menunjukkan bahwa pembentukan Organisasi Pakta Warsawa tidak dengan sendirinya berarti peningkatan ketegangan Timur-Barat di Eropa, keesokan harinya (15 Mei) Rusia menandatangani Perjanjian Austria yang bertujuan menjadikannya contoh kenetralan bagi Jerman. Akan tetapi, Jerman Barat sudah terlanjur mengintegrasikan dirinya dengan blok Barat dan tiada jalan untuk mundur kembali. Ternyata bahwa garis yang ditempuh oleh Jerman Barat ini membawa sukses gemilang bagi Bonn, karena, telah menjadikan dirinya sebuah negara industri Eropa yang terkuat dan sebuah benteng Eropa Barat di bidang militer, ekonomi dan organisasi politik. Akan tetapi, di belakang kenyataan ini, sukses gemilang Jerman Barat tersebut telah menjadi salah satu sumber kecemasan dan ketegangan di Eropa.

IV

Ketika Jerman Barat masuk menjadi negara anggota NATO itu, di Rusia sedang terjadi perjuangan kekuasaan post-Stalin yang baru dalam tahun 1957 berakhir dengan kemenangan Nikita Khrushchov, tetapi, suatu kemenangan yang tidak komplit. Baru setelah berakhirnya perjuangan kekuasaan post-Stalin itu, Khrushchov dapat mengambil langkah dalam bulan November 1958 dengan memperbarui tekanan terhadap Berlin Barat. Krisis Berlin ini berlangsung selama beberapa tahun sampai Rusia mendirikan Tembok Berlin dalam tahun 1961 sebagai pilihan lain daripada pecahnya Perang Dunia III

yang ketika itu dicemaskan oleh seluruh dunia. Krisis Berlin ini juga menerangkan mengapa de Gaulle tidak lagi mempercayai komitmen AS pada Eropa, sehingga, Prancis ingin mengadakan pertahanan sendiri dan keluar dari NATO sebagai organisasi militer. Hal itu dilaksanakannya dalam tahun 1966, salah satu faktor yang menerangkan mengapa dalam tahun itu Rusia melancarkan kampanye besar-besaran, baik di Eropa Timur maupun di Eropa Barat, untuk memajukan suatu perubahan rencana-rencana keamanan se-Eropa. Akan tetapi, tekanan Rusia terhadap Bonn telah menjadi tumpul dengan jatuhnya Kanselir Ludwig Erhard dalam akhir tahun 1966. Pemerintahan Jerman Barat di bawah Erhard adalah yang paling lemah, sehingga, Demokrat Kristen harus mengadakan koalisi besar dengan Demokrat Sosial sebagai hasil pemilihan umum akhir tahun itu. Duduk sebagai menteri luar negeri, Brandt sudah mulai menjalankan Ostpolitik yang berhasil menjalin hubungan-hubungan diplomatik Jerman Barat dengan Rumania dalam tahun 1967. Akan tetapi, ketika dalam tahun 1968 Brandt hendak melakukan langkah serupa dengan Praha, Rusia mengerahkan setengah juta pasukan Organisasi Pakta Warsawa ke Cekoslowakia sebagai pameran kekuatan ketika NATO ternyata lagi mengalami penyakit yang masih harus disembuhkan. Setelah invasi Rusia ke Cekoslowakia itulah Brandt yang akhirnya, dalam koalisi dengan Demokrat Bebas, berhasil menjadi kanselir hasil pemilihan umum tahun 1969 untuk menjalankan Ostpolitik guna menciptakan peredaan ketegangan sebagai konsesi Blok Timur.

Gambaran yang dapat diperoleh dari perkembangan keadaan strategis di Eropa sejak tahun 1952 hingga 1968 itu menunjukkan bahwa masalah Jerman belum dapat dipecahkan dan demikianlah pula masalah stabilisasi di Eropa Tengah, meskipun kelihatannya Rusia telah berhasil menciptakan hegemoni di Eropa Timur. Bahkan hingga kini apa yang disebut puncak prestasi politik manusia itu di Eropa masih tetap belum tercapai. Rusia ingin menafsirkan Perjanjian Helsinki 1975 sebagai pengakuan Barat kepada hegemoni Moskwa di Eropa Timur, tetapi, keinginannya itu tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan, lima tahun kemudian terjadi pergolakan hebat di Polandia. Hanya yang membesarkan hati, ialah, bahwa lebih dari 40 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II tidak pecah perang di Eropa, meskipun di Asia tidak hanya dikenal Perang Korea dan Perang Indocina, tetapi, juga Perang Indo-Pakistan, Perang Irak-Iran, dan Perang Afghan, di mana Rusia sendiri terlibat di dalamnya.

Untuk menerangkan gejala ini perlu diketahui dua prinsip dalam ekspansi Rusia yang dapat dilihat selama beberapa abad yang terakhir ini. Prinsip yang

pertama adalah maju mengambil sejengkal tanah demi sejengkal tanah ke wilayah yang berhampiran secara teritorial sedemikian rupa, sehingga, gerakan-gerakan pasukan dan pemukimannya akan dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini berbeda dengan prinsip dalam ekspansi yang dipakai oleh imperium-imperium Barat yang mengambil tanah jajahan mereka melalui laut. Prinsip yang kedua, yang dipakai oleh Rusia, adalah mengelakkan suatu benturan dengan negara yang lebih besar, bahkan, dengan negara yang sama besar sekalipun, tetapi, negara besar tersebut jangan sampai terdapat di seberang perbatasan Rusia. Jika gerakan ekspansi Rusia itu menghadapi suatu perlawanan yang berbahaya maka gerakan tersebut akan mencari haluan lain.

Sebagai contoh dapat diambil kekalahan Rusia dalam Perang Krim dengan Turki yang bersekutu dengan Inggris, Prancis dan Sardinia (1853-1856). Oleh sebab kalah, Rusia mengubah gerakan ekspansinya ke daerah-daerah Sungai Amur dan Sungai Ussuri sampai menemukan Wladiwostok dalam tahun 1860. Sesudah itu sekali lagi Rusia kembali ke Balkan untuk memaksa Turki agar membentuk negara Bulgaria Raya di bawah protektorat Rusia, tetapi, ditentang oleh Inggris dan Austro-Hongaria. Perselisihan ini diselesaikan dalam Kongres Berlin dalam tahun 1878 yang diketuai oleh Bismarck. Hasilnya, negara Bulgaria Raya di bawah protektorat Rusia tidak jadi boleh dibentuk dan Rusia harus cukup puas dengan memperoleh Bessarabia dan sebagian Armenia, sedang Austro-Hongaria boleh menduduki Bosnia dan Herzegovina. Dengan hasil Kongres Berlin ini terpaksa Rusia mengubah gerakannya dari Balkan ke Asia Tengah sampai ke perbatasan Afghanistan.

Walaupun sejak tahun 1917 telah menjadi sebuah negara sosialis, Rusia tetap mempertahankan kedua prinsip dalam ekspansinya tersebut. Bahkan, setelah Perang Dunia II berakhir. Dalam Perang Dunia II, Rusia dan Inggris menduduki Iran, karena, yang terakhir ini ingin bersekutu dengan Jerman. Setelah Perang Dunia II berakhir, Inggris menarik pasukannya dari Iran, tetapi, Rusia ingin terus mendudukinya. Bahkan telah menciptakan sebuah pemerintah boneka di Azerbaijan, untuk melindungi wilayah Iran yang dalam awal abad ke-19 dicaplok oleh Rusia, tetapi, ketika terjadi Revolusi 1917 di Rusia, bersama berintegrasi kembali dengan Iran, namun, dapat dikuasai kembali oleh Rusia. Wilayah ini kemudian menjadi sebuah negara bagian di dalam lingkungan Uni Republik Sosialis Soviet dan disebut Republik Soviet Azerbaijan, tetapi, usaha Rusia untuk memperluas Republik Soviet Azerbaijan ini dengan wilayah Azerbaijan yang masih tetap menjadi wilayah Iran gagal, disebabkan bukan saja oleh karena ketabahan hati Iran, tetapi, juga oleh kemampuan negara-negara Barat untuk mengadakan intervensi secara efektif. Akhirnya Rusia terpaksa juga menarik pasukannya dari Iran. Ketika itu Rusia juga berusaha mengadakan klaim-klaim teritorial terhadap Turki dan menuntut agar pangkalan-pangkalan di Selat-selat Turki dikontrol dengan sungguh-

sungguh oleh Rusia. Ancaman Rusia ini telah memaksa Turki untuk mencari dukungan Barat, sehingga, lahirlah Doktrin Truman yang dalam tahun 1952 memperluas keanggotaan NATO dengan Turki. Sebagai konsekuensi logisnya terbentuklah CENTO (1959), yang semula bernama Pakta Baghdad (1955) dan yang setelah keluarnya Irak, keanggotaannya tinggal terdiri dari Turki, Iran, Pakistan, dan Inggris. Di masa post-Shah, CENTO bubar, tetapi Turki masih tetap tinggal di dalam NATO. Dengan Doktrin Truman (1947), AS tidak hanya terlibat di Balkan, tetapi, juga di Timur Tengah, menggantikan keterlibatan Inggris. Sekali lagi Rusia terpaksa menarik diri dari Turki seperti yang telah terjadi setelah Perang Krim dan setelah Kongres Berlin, tetapi, kali ini bukan lagi Inggris yang berdiri di belakang Turki, melainkan AS.

Setelah mundur dari Turki, Rusia mengambil haluan lain. Mula-mula ke Berlin yang diblokadanya selama Maret 1948-Juni 1949, tetapi kemudian melihat ke Timur Jauh dengan menyuruh Korea Utara menyerang Korea Selatan. Ketika dengan bendera PBB, pasukan AS, yang telah memasuki Korea Utara, menghampiri Sungai Yalu, Cina mengadakan intervensi dengan mengirimkan pasukannya ke Korea Utara, dalam tahun yang sama setelah menandatangani suatu perjanjian persahabatan dengan Rusia. Setelah Perang Korea berakhir dalam tahun 1953, Rusia mulai kembali lagi mengambil haluan ke Timur Tengah. Dalam Perang Arab-Israel I, yang terkenal sebagai Perang Palestina, tahun 1948 Rusia masih membantu Israel dengan menyediakan pilot-pilot dan pesawat-pesawat udara, tetapi setelah Stalin meninggal (1953), Rusia mulai bergeser ke pihak Arab. Dalam pada itu, Rusia berhasil menjadikan Turki (dan Iran) untuk lebih bersahabat, meskipun tetap tidak berhasil menjadikan kedua negara tetangganya itu sekutu-sekutunya. Dalam memainkan peranannya di Timur Tengah, Rusia terlihat memakai pola yang sama dengan peranannya di Balkan dalam abad ke-19, dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari Pan-Slavisme dan Agama Kristen Ortodoks. Dalam peranannya di Timur Tengah sejak meninggalnya Stalin, Rusia melihat analogi Pan-Arabisme dengan Pan-Slavisme dan analogi Pan-Leftisme dengan Agama Kristen Ortodoks. Bagaimanakah peranan Rusia di Eropa setelah berakhirnya Perang Dunia II?

VI

Sebelum menjawab pertanyaan ini adalah menggoda ingatan akan pendapat ahli sejarah Inggris Arnold Toynbee. Dalam karyanya, *A Study of History*, vol. IX, halaman 244, Toynbee mengatakan:

Dalam A.D. 1952 Uni Soviet dan AS sendiri masih tetap berdiri tegak sendiri; dan dilihat dari suatu sudut strategico-politik masing-masing sikap kedua negara ini vis-a-vis satu dengan lainnya merupakan hal yang mengingatkan kepada sikap Prancis dan Hapsburg-Burgundy sekitar empat ratus tahun yang lalu. Di sebuah arena yang telah dimahukan...

waktu di luar ikatan-ikatan Eropa Barat sampai menjadi sama besarnya dengan seluruh permukaan planet, suatu keuntungan yang telah diperluas pari passu (sama tingkat) di luar ikatan-ikatan Italia, sampai dipeluknya seluruh Dunia Lama di luar batas-batas daerah Rusia sekarang, dalam A.D. 1952 telah dipersaingan antara sebuah Rusia yang menikmati keuntungan-keuntungan dari garis-garis dalam, wilayah metropolitan yang kompak, dan pemerintahan otokratis yang dipusatkan, yang pernah dinikmati oleh Prancis, dan sebuah AS yang teramat unggul dalam kekuatan yang terkumpul, bila aset-aset dari daerah-daerah jajahannya dan sekutu-sekutunya telah digabungkan dengan dirinya, sebagian besar merupakan imbalan kerugian dalam prakteknya, seperti kekuatan Raja Karel V, oleh tanggungan-tanggungan bahwa barang-barang berharga ini telah dibawa dalam kereta dan oleh berpecahnya wilayah-wilayah dan penduduk-penduduk tersebar-sebar yang sumber kekayaannya harus dibela oleh Amerika untuk mempertahankan diri agar dapat menarik mereka. Adalah lebih mudah bagi sebuah Rusia abad ke-20, sebagaimana halnya bagi sebuah Prancis abad ke-16, untuk mengejutkan lawannya, dalam melakukan serangan-serangan mendadak ke berbagai arah, daripada sebuah AS abad ke-20 untuk mengadakan mobilisasi kekuatan-kuatannya sendiri dan sekutu-sekutunya secara efektif bagi tugas berat mengepung musuh di sekitar satu garis keliling yang, skala demi skala, seimbang panjangnya dengan garis yang telah dipasang oleh Karel V untuk dikuasai.

★ Perkembangan selama lebih dari tiga dasawarsa setelah Toynbee mengamati situasi dunia tahun 1952 itu memang menyimpulkan bahwa lebih mudah bagi Rusia daripada AS dalam persaingan mereka untuk meningkatkan kekuatan antara kedua negara besar itu. Dalam tahun 1952 hanya ada dua kekuatan di dunia, Rusia dan AS, tetapi kini telah terjadi banyak perubahan, meskipun hubungan-hubungan Rusia dengan AS masih tetap menggoda untuk mengingatkan kita akan hubungan-hubungan Prancis dengan Burgundy-Hapsburg dalam abad ke-16. Akan tetapi, dengan terjadinya banyak perubahan yang condong ke pluralisme selama lebih dari tiga dasawarsa yang terakhir ini, kita dapat melihat bahwa peranan Inggris dan Prancis sebelum pecahnya Perang Dunia II kini telah diambil-alih oleh AS, sedang peranan Jerman diambil-alih oleh Rusia. Yang menjadi pertanyaan ialah, siapakah yang mengambil-alih peranan Rusia dan AS sebelum pecahnya Perang Dunia II. Perlu diperhatikan bahwa, sebelum tahun 1941, AS masih memandang perang di Eropa sebagai perang Inggris-Jerman dan baru setelah Jerman menyerang Rusia dalam tahun 1941 memandang perang di Eropa itu sebagai Perang Dunia (Kedua) yang meminta keterlibatan AS. Barangkali Cina dapat didudukkan sebagai pengambil-alih peranan Rusia, tetapi, siapa yang dapat didudukkan sebagai pengambil-alih peranan AS, masih tetap sulit untuk didapat. Lagi pula, sebagai pengambil-alih peranan Jerman -- setidaknya -- yang berlaku di Timur Tengah -- dengan menjadikan dirinya kampiun perjuangan melawan Barat, Yahudi dan sistem liberalisme atau kapitalisme, Rusia berhasil memperoleh sukses, sedang Jerman telah menemui kegagalan. Walaupun begitu, harus diperhatikan bahwa peta bumi politik Timur Tengah telah mengalami perubahan yang cukup besar. Peranan Mesir, yang selagi memegang kepemimpinan perjuangan Arab sampai dengan tahun 1973, masih

dengan Westernisme, Judaisme, dan Liberal-Kapitalisme, kini sejak tahun 1975 atau, setidaknya, sejak tahun 1979 telah menyerupai peranan sebuah sekutu Barat. Oleh sebab Mesir adalah poros dunia Arab, sulit bagi Rusia untuk ikut serta dalam penyelesaian masalah Timur Tengah gaya Jenewa. Tidaklah demikian yang terlihat dalam akhir tahun-tahun 1960-an, ketika Rusia mulai meraih keuntungan politik sebesar-besarnya di Timur Tengah. Akan tetapi, sebagaimana Jerman tak berhasil mengalahkan Inggris dalam Perang Dunia II, demikianlah pula Rusia tak berhasil menyingkirkan AS dari Timur Tengah. Bahkan, setelah Perang Arab-Israel ke-4 (1973), prakarsa perdamaian Timur Tengah masih tetap berada di tangan AS.

VII

Peranan Rusia di Asia – dan tidak saja di Timur Tengah -- dapat juga mengingatkan kepada peranan Inggris dalam abad ke-19. Dalam analogi ini, peranan Rusia diambil-alih oleh Cina. Bedanya hanyalah bahwa dalam abad ke-19 Inggris mencari peranan di Timur Tengah untuk mengamankan jalur laut dari Eropa ke Asia, sedang peranan Rusia di kawasan itu dalam abad ke-20 tidak didasarkan pada pertimbangan keamanan jalur laut, dan bahwa Inggris sudah berada di Asia Selatan terlebih dulu sebelum mulai memainkan peranan di Timur Tengah, sedang Rusia berada di Asia Selatan kemudian yang hendak diperkuat dengan mengadakan invasi ke Afghanistan. Invasi Rusia ke Afghanistan seringkali dibandingkan dengan invasi Pakta Warsawa ke Cekoslowakia. Perbandingan ini tidak sangat tepat. Sebab, Cekoslowakia dalam tahun 1968 sudah 20 tahun menjadi negara sosialis dan sudah 13 tahun menjadi anggota Organisasi Pakta Warsawa sejak pembentukannya dalam tahun 1955, sedang Afghanistan dalam tahun 1979 masih tetap menjadi negara non-blok, kendatipun telah satu tahun menandatangani suatu perjanjian persahabatan dengan Rusia. Walaupun begitu, seandainya Rusia, setelah Cekoslowakia, melanjutkan invasinya ke Yugoslavia dan Austria, masih sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekspansinya, asal tidak terdapat risiko benturan dengan sesama negara besar. Invasinya ke Cekoslowakia tidak membawa risiko benturan dengan sesama negara besar, tetapi invasinya ke Afghanistan telah mengubah Presiden Carter menjadi seorang Chamberlain yang menjadi elang rajawali setelah Jerman dalam tahun 1939 mengadakan invasi ke Polandia. Menang De Gaulle benar ketika mengatakan kepada Presiden Kennedy yang mengunjungi Paris dalam tahun 1961 bahwa Rusia tidak akan berperang hanya karena krisis Berlin. Akan tetapi, Berlin dalam tahun 1961 tidak sama dengan Cekoslowakia dalam tahun 1968.

Kesimpulan saya, ialah bahwa perang adalah daya gerak sejarah umat manusia, tetapi apabila bergantung kepada kemauan Rusia, perang tidak akan

terjadi dengan blok Barat selama dua prinsip dalam ekspansinya masih dipakai. Perang Jerman-Rusia telah pecah dalam tahun 1941, oleh karena Rusia telah diserang terlebih dulu, di luar kemauannya. Memang mungkin Perang Jerman-Rusia akan mengilhami Rusia untuk mengubah dua prinsip dalam ekspansinya, tetapi hingga hari ini belum terdapat petunjuk akan adanya perubahan itu. Apa yang kini dilakukan oleh Rusia di Afghanistan masih tetap menurut dua prinsip dalam ekspansinya. Ketika mengambil bagian dalam front timur dalam akhir Perang Dunia II, Rusia sebagian besar masih bergerak di kawasan kontinental, meskipun kemudian mengambil beberapa pulau Jepang.

Saya ingin mengakhiri pembicaraan ini dengan mengutip Raymond Aron dalam karyanya *Peace and War* dalam halaman 355 yang mengatakan:

Peperangan dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang, diperbesar oleh kemenangan-kemenangan sebelumnya, menyerahkan monopoli senjata kepada suatu klas militer, mempunyai dua fungsi: peperangan tersebut memperkokoh persatuan kelompok-kelompok yang bermusuhan, tetapi juga menyetujui penyelesaian masalah-masalah perbatasan-perbatasan, keputusan mengenai termasuk ke mana suatu penduduk atau suatu propinsi. Berbeda dengan dua macam peperangan yang dulu, peperangan memiliki suatu fungsi sejarah, dan tidak hanya fungsi sosial atau pragmatis belaka. Tanpa peperangan, perkembangan kebudayaan-kebudayaan tak dapat dimengerti.